

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

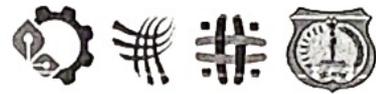
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Semoga Laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Kepulauan Selayar.


KEPALA DINAS
ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Sistem manajemen pemerintahan sudah harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam peningkatan akuntabilitas, setiap rencana kinerja didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, dan mampu merespon setiap isu permasalahan strategis yang muncul, serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 telah ditetapkan 12 (dua belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 56 (Lima puluh enam) Sub kegiatan yang diwujudkan melalui penetapan kinerja yang dilaksanakan dan harus dicapai dalam tahun 2022 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dari hasil laporan pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan pencapaian target kegiatan di akhir tahun 2022 dengan realisasi sebesar 95,50 %. Dan ini menunjukkan ada peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja organisasi dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatkan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah yang berkualitas dengan pemberian bantuan peralatan, pelatihan, sosialisasi dan workshop kepada para pelaku





usaha agar mampu mengembangkan hasil produksinya dan pendapatan para pelaku juga meningkat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar dengan pembangunan pasar rakyat di 3 kecamatan kepulauan, Peningkatan fasilitas kemeterologian dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan retribusi dan tera/tera ulang pada peningkatan PAD, Peningkatan Peran Koperasi yang berkualitas dengan 137 koperasi aktif, dan Peningkatan Peran UMKM dalam lembaga perbankan agar dapat meningkatkan kualitas produksinya yang hingga saat ini sudah mencapai 261 calon debitur.





DAFTAR TABEL

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021.....	28
Tabel Rencana Kinerja Tahun 2021.....	31
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021	50
Pengukuran Kinerja Tahun 2021.....	53





DAFTAR ISI

SAMPUL (HALAMAN JUDUL)	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	v
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambar Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	2
D. Isu-Isu Strategis.....	12
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A... Rencana Strategis.....	22
B... Indikator Kinerja Utama.....	28
C... Rencana Kerja Tahunan.....	31
D... Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	49
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	53
B. Analisis Capaian Kinerja.....	54
C. Realisasi Keuangan.....	68
BAB. IV PENUTUP	80
LAMPIRAN	81
Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	82





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.





B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.





Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam merumuskan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;





- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Profesionalisme pegawai;

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 94 (Sembilan puluh empat) orang Pegawai, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, 61 (Enam puluh satu) orang Pegawai Harian Lepas, Untuk lebih jelas ada pada data terlampir.





✚ Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Dinas/Bidang/Seksi	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Org
2	Sekretariat	1 Org	7 Org	2 Org	10 Org
3	Perindustrian	1 Org	4 Org	1 Org	6 Org
4	Perdagangan	1 Org	7 Org	1 Org	9 Org
5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Org	6 Org	-	7 Org
	Total	5 Org	24 Org	4 Org	33 Org

✚ Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PHL	Jumlah
1	S2	7 Org	-	7 Org
2	S1	17 Org	26 Org	43 Org
3	D.III	2 Org	2 Org	4 Org
4	D.II	-	4 Org	4 Org
5	SMA	7 Org	28 Org	35 Org
6	SMP	-	1 Org	1 Org
	Total	33 Org	61 Org	94 Org

✚ Data Pegawai Berdasarkan Diklat/Penjenjangan

No	Dinas/Bidang/Seksi	Diklat / Penjenjangan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Orang
2	Sekretariat	-	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3	Perindustrian	-	1 Orang	2 Orang	3 Orang
4	Perdagangan	-	-	3 Orang	3 Orang
5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1 Orang	3 Orang	4 Orang
	Total	1 Orang	3 Orang	9 Orang	13 Orang





b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember 2022 sebagaimana berikut :

NO.	NAMA BARANG	Jumah	Satuan	Keterangan
1	Komputer	18	Unit	Baik
2	Laptop	46	Unit	Baik
3	Notebook	8	Unit	Baik
4	Printer	18	Unit	Baik
5	Scanner	1	Unit	Baik
6	Sepeda Motor	25	Unit	Baik
7	Mesin Las Listrik	1	Unit	Baik
8	Mesin Pompa Air	3	Unit	Baik
9	Termometer	1	Unit	Baik
10	Stopwastch	1	Unit	Baik
11	Tool Set	2	Unit	Baik
12	Landasan Cap Lengkap	2	Unit	Baik
13	Tang Plombir	4	Unit	Baik
14	Bejana Ukur	4	Unit	Baik
15	Timbangan Meja Kapasitas 10 KG	6	Unit	Baik
16	Anak Timbangan Miligram	3	Unit	Baik
17	Anak Timbangan Bidur	25	Unit	Baik
18	Lemari Besi	7	Unit	Baik
19	Lemari Kayu	2	Unit	Baik
20	Rak Kayu	1	Unit	Baik
21	Filling Cabinet Besi	2	Unit	Baik
22	Lemari Kaca	5	Unit	Baik





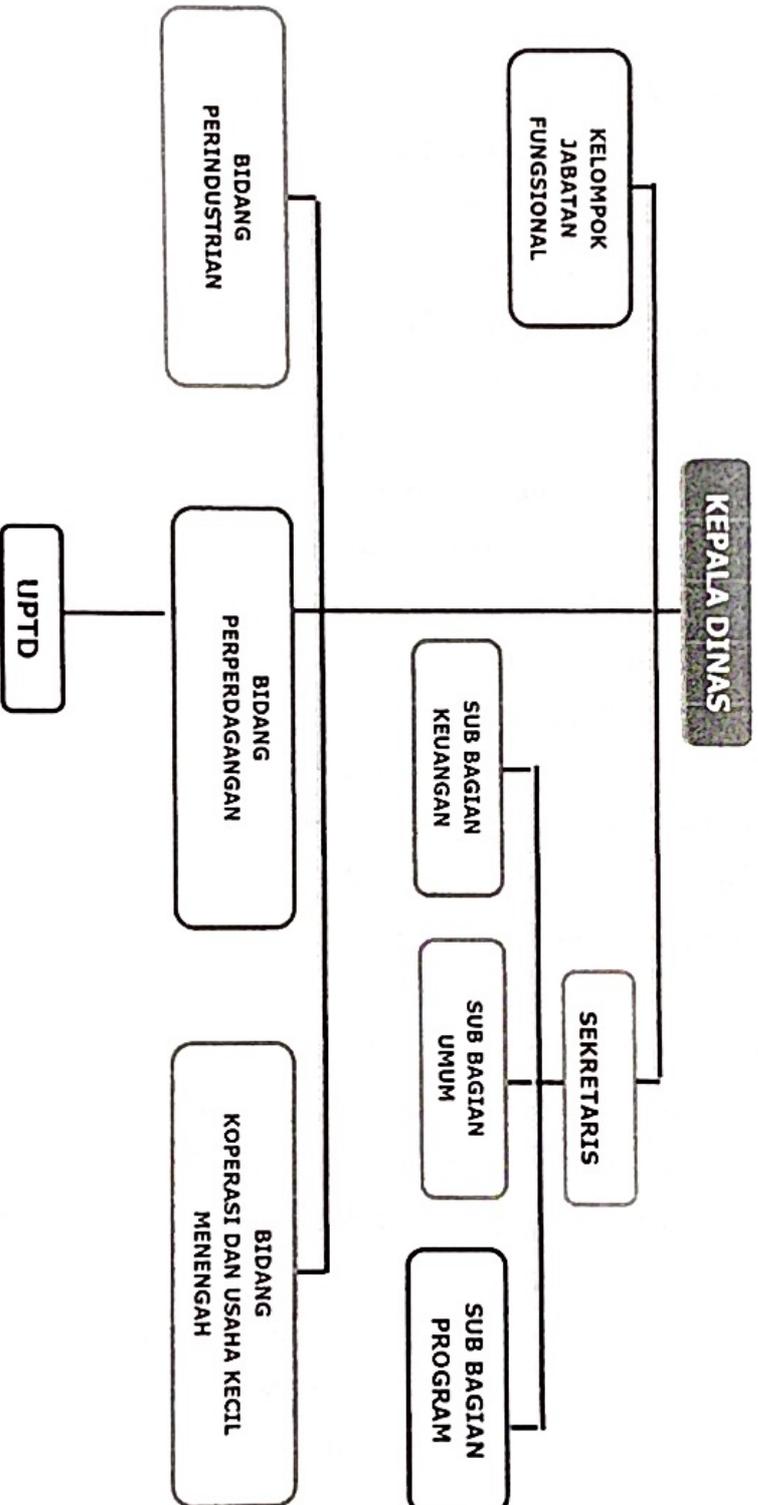
23	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
24	Meja Kerja Kayu	37	Unit	Baik
25	Kursi Besi	2	Unit	Baik
26	Kursi Rapat	120	Unit	Baik
27	Kursi Tamu	3	Unit	Baik
28	Kursi Putar	27	Unit	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
30	Lemari Es	2	Unit	Baik
31	AC	20	Unit	Baik
32	TV	8	Unit	Baik
33	Loudspeaker	1	Unit	Baik
34	Soundsystem	1	Unit	Baik
35	Gordyin	3	Unit	Baik
36	Buffet Kayu	2	Unit	Baik
37	Buffet Kaca	6	Unit	Baik
38	Lemari Arsip	3	Unit	Baik
39	Proyektor	5	Unit	Baik
40	Kamera Digital	7	Unit	Baik
41	Faxmile	1	Unit	Baik
42	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	2	Unit	Baik
43	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	Unit	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Lain	9	Unit	Baik





GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI





4. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Sistematika Penulisan

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :





BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah
- D. Isu-Isu Strategis

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kerja Tahunan
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Keuangan

BAB. IV. PENUTUP

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

6. Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di kategorikan pada 6 (enam) peran yang saling terkait, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai kebijaksanaan perundang- undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;





3. Pembinaan secara continue guna pengembangan UKM dan IKM, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;
4. Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang-barang beredar serta pengkoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
5. Pembinaan, koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
6. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

7. Inovasi

Sampai saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Pelatihan lebih difokuskan pada bidang digital marketing, desain produk, dan penciptaan produk yang market oriented.

Dengan melihat berkembang pesatnya pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga harus diikuti peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan melahirkan para wirausahawan yang





kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dinas Perindag KUKM juga mendorong para pelaku usaha membentuk sebuah wadah koperasi yang mengatasi kebutuhan anggotanya, dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam tolong menolong.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut berbasis potensi lokal bidang olahan komoditas kelapa dan pelatihan vocational bidang olahan komoditas ikan dengan total peserta sebanyak 275 orang pelaku IKM/UMKM se-Kabupaten Kepulauan Selayar

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, dengan mendatangkan para ahli sebagai instruktur. Seperti instruktur digital marketing, olahan kelapa melalui pembuatan VCO, minyak kelapa, kerajinan berbahan batok kelapa, olahan ikan melalui pembuatan bakso ikan, siomay ikan dan otak-otak ikan.

Dalam pelaksanaannya, peserta bisa langsung praktek dengan didampingi instruktur. Sehingga, para peserta dapat langsung melakukannya setelah selesai kegiatan, para pelaku wirausaha harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk memacu produktifitas dan meningkatkan efisiensi usaha.

Selain itu, Pelaku usaha juga harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi para wirausaha jangan cepat berpuas diri dan tidak lagi berpatokan hanya product oriented, tetapi harus market oriented. "Artinya, harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan akan datang".

D. ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dalam





melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa isu-isu strategis, antara lain:

D.1. BIDANG INDUSTRI

Isu-isu strategis bidang urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Data lewat SIINAS karena terkendala banyaknya persyaratan tambahan data dukung yang sulit dipenuhi oleh pelaku IKM seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha, OSS, dan lainnya.
2. Luasnya area cakupan pelaku industri meliputi 6 (enam) kecamatan di Kepulauan, sehingga sulit untuk mengakses pelaku Industri secara bersamaan.
3. Jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas.
4. Masih lemahnya SDM pelaku IKM di Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Sulitnya mengakses permodalan karena keterbatasan lembaga bank dan non bank, hal ini yang menyebabkan pelaku IKM sangat sulit untuk ekspansi usaha, untuk dikeulauan lembaga keuangan bank yang ada baru 1 (satu), itupun statusnya masih kantor kas sehingga tidak bisa memutus kredit, hal ini menyebabkan semua pelaku usaha yang berdomisili di 6 (enam) kecamatan kepulauan harus datang ke ibu kota kabupaten untuk bisa mengakses kredit dilembaga keuangan. Itupun maksimal hanya Rp. 500 juta untuk pengambilan diatas Rp. 500 Juta harus diakses lewat kantor wilayah Makassar.
6. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah dan Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, disebabkan oleh kurangnya hubungan kemitraan dalam hal pemasaran, design produk yang masih konservatif, kualitas produk belum memenuhi standar pasar, dan sisi higienis produk yang masih perlu ditingkatkan, cita rasa yang masih perlu mendapat diperensiasi dan lainnya.





7. Untuk tahun berjalan, belum optimalnya peran strategis struktur industri dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena banyaknya anggaran yang direcofusing dan diarahkan kepada penanganan dampak bencana dan inflasi.
8. Belum optimalnya realisasi program kepulaun selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik (PDL) kawasan indonesia timur dan pembangunan Kawasan Industri Selayar (KIS)

Namun Pencapaian kinerja di tahun 2022, Dinas Perindagkum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencanangkan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan segala sarana penunjang pelaksanaan sebuah bandar niaga di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk Proyek Investasi IPRO (Investment Project Ready to offer) melalui kerjasama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kementerian investasi.

Adapun mekanisme dan rancangan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri adalah :

1. Menyediakan kebijakan dan regulasi yang saling mendukung antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional,
2. Menyediakan kawasan dengan luas lahan yang cukup untuk pengembangan sebuah bandar niaga.
3. Membuat dan menetapkan regulasi pelaksana /pengelola pengembangan kawasan Distribusi Logistik.
4. Melakukan konsolidasi dan pemasaran investasi kepada pihak Sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan kawasan industri ini yaitu :
 - ✦ Penetapan tempat dan luas kawasan Distribusi Logistik.
 - ✦ Konsolidasi dan Sikronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasasn Strategis Nasional
 - ✦ Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik.





- ✚ Pemetaan dan Pengukuran Kawasan Distribusi Logistik.
- ✚ Penyusunan master plan, Study Kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan pengembangan kawasan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah disusun jadwal kegiatan dalam rangka pengembangan kawasan sebagai penyedia infrastruktur dasar sebuah bandar niaga, seperti Kawasan konsolidasi, Sarana pelabuhan, Sarana jalan, Air Bersih, Telekomunikasi, Sentra jasa pertokoan dan Pergudangan, Sentra industri kecil, Menengah dan Besar, Sentra Perkantoran dan Kawasan penunjang pengembangan kawasan lainnya, sebagai berikut :

- ✓ Penetapan tempat dan luas kawasan Distribusi Logistik
- ✓ Konsolidasi dan Sikronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasasn Strategis Nasional
- ✓ Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik
- ✓ Pengukuran Lahan Kawasan Distribusi Logistik
- ✓ Penyusunan master plan, Study Kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan

Dalam pencapaian target disektor perindustrian terdapat beberapa kendala khususnya terkait program pengembangan kawasan distribusi logistic Indonesia timur yaitu antara lain sebagai berikut :

- ❖ Penetapan kawasan, luas lahan dan legalitas penggunaan lahan dalam kawasan
- ❖ Sinkronisasi regulasi dan Kebijakan pengembangan kawasan dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- ❖ Pembangunan Infrastruktur Dasar
- ❖ Banyaknya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya karena adanya relokasi anggaran yang diarahkan kepada penanganan covid-19, dampak bencana alam dan inflasi daerah.
- ❖ Belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM sehingga masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat,





disebabkan karena perlunya pengembangan kemampuan bagi para pendata dan pelaku IKM dalam bentuk pelatihan.

- ❖ Belum berfungsinya SIINAS sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid.
- ❖ Sifat apatisme masyarakat yang tidak didukung oleh sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menganggap program gerbang sari sebagai suatu hal yang tidak penting.
- ❖ Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui kontainer.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Menyiapkan dana darurat yang memadai
2. Melakukan langkah-langkah penganggaran yang tepat
3. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
4. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsunan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.
5. Melakukan sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah
6. Meningkatkan produksi pertanian, agro industri dan perikanan.

D.2. BIDANG PERDAGANGAN

Isu-isu strategis bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut :





1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkut logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan
2. Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang, yang merupakan persyaratan untuk dapat memasuki wilayah negara tujuan, dan SKA juga merupakan persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh negara tujuan. SKA diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKA atas barang Ekspor di Indonesia
3. Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih memasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar.
4. Menurunnya omzet para pedagang akibat menurunnya daya beli masyarakat oleh karena adanya pandemik covid-19 sampai saat ini.
5. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar target pendapatan dapat tercapai adalah dengan mengidentifikasi pungutan retribusi atas capaian yang tidak memenuhi target.
6. Adanya beberapa pasar yang dibangun namun sampai saat ini belum difungsikan/dimanfaatkan oleh karena para pedagang lebih menyukai hamparan dibanding los dan kios dalam bangunan gedung pasar yang telah dibangun.





Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM.
2. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui container

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik dan kawasan industri khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Melakukan pembinaan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat





D.3. KOPERASI DAN UKM

Koperasi sebagai salah satu bentuk Ekonomi Industri yang sangat penting karena keberadaannya di dukung oleh pemerintah dan sudah memasyarakat. Namun masalah yang dihadapi adalah kualitas manajemen koperasi yang masih di laksanakan secara tradisional sehingga kurang mampu bersaing baik dengan swasta maupun dengan usaha asing. Oleh sebab itu untuk mengatasi kelemahan tersebut tersebut perlu diadakan repositioning yang lebih menekankan pada aspek teknologi dan SDM (Brain Manajemen). Apalagi saat ini semua aktifitas lebih diarahkan kepada penanganan dampak pandemi covid-19.

Jumlah pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar Bervariasi dari tahun 2017-2022 sebanyak 19.625 pelaku UMKM dari berbagai sektor. dan potensi Sumber Daya Alam yang di miliki Kabupaten Kepulauan Selayar cukup lengkap dan beragam baik pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan maupun pariwisata yang semoga dapat dikelola dan di kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun karena keterbatasan SDM maupun teknologi cepat guna

Permasalahan strategisnya yaitu :

1. Pemodal adalah masalah UKM yang utama. Efeknya para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
2. Kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.
3. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.





4. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan akses dalam hal mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota.
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya.
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.
4. Kondisi pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan karena semuanya diarahkan ke penanganan covid-19.
5. Masih rendahnya pelaksanaan ART
6. Adanya tunggakan penerima bantuan
7. Kegiatan usaha tidak berjalan
8. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
9. Terbatasnya tenaga terampil.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;





3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
5. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
6. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi.
7. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
8. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
4. Memfasilitasi kemitraan usaaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaàgenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.





BAB II

PERENCANANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

- **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.

“Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” mengandung dua pengertian kondisi, pertama sebagai Bandar maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Yang kedua sebagai Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup Kabupaten / Kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.





- **Misi**

Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan transparan.
- ❖ Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan.
- ❖ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- ❖ Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
- ❖ Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
- ❖ Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM diatas mengandung arti :

1. Industri adalah meningkatkan kualitas produk industri kecil maupun menengah;
2. Perdagangan adalah meningkatkan daya saing daerah;
3. Koperasi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi;
4. Usaha Kecil Menengah, adalah menumbuhkembangkan UKM/pedagang kaki lima sebagai ujung tombak perekonomian yang berbasis ekonomi dan kerakyatan.
5. Kemeterologian dan Perlindungan Konsumen, adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Tujuan dan Sasaran**

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Daerah
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.





3. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman
5. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya.
6. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

Sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya daya beli masyarakat.
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan
5. Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa).
6. Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th. 2022
I.	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia	<u>Misi 1:</u> Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatnya Nilai SAKIP 3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Kepuasan layanan - Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal Laporan Keuangan Sesuai SAP	60 19,25 13,15 12,15 11,51 100



2.	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembnagunaan Pedesaan	Meningkatkan kemandirian pelaku usaha	Menigkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	- Persentase koperasi aktif -Persentase UKM Non BPR / LKM Aktif - Persentase BPR / LKM Aktif - Persentase usaha mikro dan kecil - Persentase koperasi yang berkualitas	85,5 100 100 100 3
3.	Misi 3 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha	Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha	-Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha - Persentase kontribusi terhadap PDRB -Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB -Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah - Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja - Persentase IKM yang terdaftar pada SIINAS - Cakupan bina kelompok pengrajin	77,95 2,9 7,88 1300 0,67 100 100
4.	Misi 4 : Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman	Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal	- Persentase rekomendasi izin usaha sektor perdagangan yang diterbitkan - Persentase kinerja realisasi pupuk - Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100 100 100



- Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
- Persentase alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku	12,04
- Persentase produk lokal yang dipasarkan	100
- Cakupan bina kelompok pedagang / Usaha Informal	100

• Strategi Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- ✦ Optimalisasi peranan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global.
- ✦ Pengembangan IKM, Koperasi dan UMKM yang maju, berdaya dalam mendukung perekonomian daerah.
- ✦ Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian IKM, Koperasi dan UMKM.
- ✦ Peningkatan pasar produk dalam negeri.
- ✦ Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan.
- ✦ Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
- ✦ Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan.



Kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran.
3. Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah.
5. Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah.
6. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit system*.
7. Perbaikan dan penerapan Sistem dan Prosedur pelayanan public.
8. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin.
9. Perbaikan income perkapita.
10. Pengendalian harga.
11. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita.
12. Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah.
13. Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata
14. Peningkatan sadar wisata.
15. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar).
16. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.





B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 diadakan perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang semula 6 urusan yakni, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Kemetrollogian, Urusan, Koperasi dan Urusan Usaha Kecil Menengah menjadi 3 urusan yakni Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021-2026

Nama Organisasi	: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan daerah
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah2. Pengendalian Kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.





NO	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian					
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	35 IKM	40 IKM	45 IKM	50 IKM	50 IKM
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	20 IKM	25 IKM	30 IKM	32 IKM	51 IKM
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar					
	a. Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	65%	70%	75%	80%	85%
	b. Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	65	70	75	80	100
	c. Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH	250 UTTP	350 UTTP	500 UTTP	600 UTTP	600 UTTP
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM :					
	a. Persentase Koperasi Aktif	116	123	130	138	138
	b. Persentase Koperasi Sehat	138	140	145	150	150
	c. Persentase Peningkatan	200	250	300	350	350





UMKM yang Produktif	UKM	UKM	UKM	UKM	UKM
d Persentase Peningkatan	30	35	40	45 UKM	45
. Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	UKM	UKM	UKM		UKM

KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005





C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tabel 2.3.1
Rencana Kerja Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Sumber		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2		4	5	6			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3	3	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Kab. Kep. Selayar	BB	6.517.318.000	APBD
			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	95.496.000	APBD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, RKT dan Renja selesai tepat waktu	Kab. Kep. Selayar	3 Doku men	18.446.000	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	Kab. Kep. Selayar	1 Doku men	11.500.000	APBD





		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah RKAP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	11.500.000	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5.750.000	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPAP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5.750.000	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LAKIP, LKPJ, LPPD)	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	17.250.000	APBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan implementasi RB	Kab. Kep. Selayar	13 Dokumen	25.300.000	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	4.324.825.000	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Kep. Selayar	39 Orang	4.295.825.000	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	CALK	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15.000.000	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	RFK	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	7.000.000	APBD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis	Kab. Kep. Selayar	2 laporan	7.000.000	APBD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase peningkatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	31.500.000	APBD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase peningkatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Selayar	100%	5.000.000	APBD
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	100%	10.000.000	APBD





			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	100%	6.500.000	APBD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	100%	10.000.000	APBD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	215.000.000	APBD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Selayar	100%	50.000.000	APBD
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Selayar	100%	5.000.000	APBD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Selayar	100%	80.000.000	APBD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Selayar	100%	80.000.000	APBD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	590.335.000	APBD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kep. Selayar	100%	75.000.000	APBD
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase peningkatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Kep. Selayar	100%	106.000.000	APBD





			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kep. Selayar	100%	5.635.000	APBD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase peningkatan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Kep. Selayar	100%	34.500.000	APBD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	100%	369.200.000	APBD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	522.200.000	APBD
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	250.000.000	APBD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	95.000.000	APBD
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	172.500.000	APBD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kep. Selayar	100%	4.700.000	APBD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	612.562.000	APBD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Kab. Kep. Selayar	100%	67.600.000	APBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan pelayanan umum kantor	Kab. Kep. Selayar	100%	544.962.000	APBD





			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	125.400.000	APBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	100%	66.600.000	APBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selayar	100%	11.500.000	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	100%	47.300.000	APBD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
2	1 7	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Kab. Kep. Selayar	100%	237.240.000	APBD





			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya koperasi yang akuntabel	Kab. Kep. Selayar	100%	237.240.000	APBD
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang berkualitas sehat	Kab. Kep. Selayar	100%	90.240.000	APBD
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesadaran berkoperasi	Kab. Kep. Selayar	100%	147.000.000	APBD
2	1 7	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kab. Kep. Selayar	100%	150.000.000	APBD
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Kab. Kep. Selayar	100%	150.000.000	APBD
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkualitas sehat, kerjasama pemasaran produk andalan KUMKM, terwujudnya sinergitas dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi Dekopinda	Kab. Kep. Selayar	162 Koperasi	150.000.000	APBD





2	1 7	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Kab. Kep. Selayar	100%	135.250.000	APBD
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya koperasi yang berprestasi	Kab. Kep. Selayar	100%	135.250.000	APBD
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkualitas sehat	Kab. Kep. Selayar	135 Koperasi	40.250.000	APBD
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang aktif	Kab. Kep. Selayar	135 Koperasi	95.000.000	APBD
2	1 7	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian	Kab. Kep. Selayar	100%	150.000.000	APBD
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian	Kab. Kep. Selayar	60 Koperasi	150.000.000	APBD
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang ber RAT	Kab. Kep. Selayar	162 Koperasi	150.000.000	APBD
2	1 7	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam	Kab. Kep. Selayar	100%	-	





			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%		-
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%		-
2	1 7	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pengembangan UMKM	Kab. Kep. Selayar	100%	2.581.975.000	APBD
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pendapatan UMKM meningkat	Kab. Kep. Selayar	100%	2.581.975.000	APBD
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah peralatan yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	37 Unit	2.581.975.000	APBD
2	1 7	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Kab. Kep. Selayar	100%	1.684.760.000	APBD





			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendapatan UMKM meningkat	Kab. Kep. Selayar	100%	1.684.760.000	APBD
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang akurat	Kab. Kep. Selayar	3.033 UMKM	152.260.000	APBD
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diberdayakan	Kab. Kep. Selayar	11 UMKM	900.000.000	APBD
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra yang dikembangkan	Kab. Kep. Selayar	1 Sentra	400.000.000	APBD
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang ikut pelatihan	Kab. Kep. Selayar	150 Orang	232.500.000	APBD
3	3	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Kab. Kep. Selayar	100%	200.000.000	APBD
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD





		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	penerbitan surat rekomendasi perizinan	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase peningkatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase peningkatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Persentase peningkatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Persentase peningkatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kep. Selayar	100%	-	





			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peningkatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase peningkatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100%	800.000.000	APBD
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan buyer	Kab. Kep. Selayar	100%	700.000.000	APBD
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perencanaan Pembangunan Pasar dan Penyusunan Zona Kawasan Distribusi Logistik	Kab. Kep. Selayar	100 Persen	550.000.000	APBD
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100 Persen	150.000.000	APBD
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tata kelola sarana distribusi perdagangan semakin baik	Kab. Kep. Selayar	90%	100.000.000	APBD





			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100 Persen	50.000.000	APBD
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100 Persen	50.000.000	APBD
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%	450.000.000	APBD
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase peningkatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	100%	-	





			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan stabilitas, ketersediaan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat diakses setiap waktu	Kab. Kep. Selayar	100%	350.000.000	APBD
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1800 Jenis barang	100.000.000	APBD
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%	150.000.000	APBD
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelengkapan rekomendasi perizinan	Kab. Kep. Selayar	100%	-	
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Kab. Kep. Selayar	150 Pedagang	-	
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase peningkatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	100%	-	





			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase peningkatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	100%		
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%	180.000.000	APBD
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai omset meningkat	Kab. Kep. Selayar	100%	180.000.000	APBD
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase peningkatan nilai omset	Kab. Kep. Selayar	100%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	dan kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jeneponto pelatihan pembuatan gerabah	Kab. Kep. Selayar	100 Persen 50 Orang	180.000.000	APBD APBD
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan ekspor	Kab. Kep. Selayar	100%	400.000.000	APBD





			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan peningkatan barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar	Kab. Kep. Selayar	100%	400.000.000	APBD
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100 Persen	50.000.000	APBD
			Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Kab. Kep. Selayar	1 kali	100.000.000	APBD
			Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	50.000.000	APBD
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan transaksi antara pelaku usaha dengan pembeli (buyer)	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	50.000.000	APBD
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Peningkatan SDM Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Kep. Selayar	100 Persen	50.000.000	APBD
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Kab. Kep. Selayar	100%	200.000.000	APBD
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan/pengembangan sistem distribusi barang/produk menjadi pusat perdagangan antar pulau	Kab. Kep. Selayar	100%	200.000.000	APBD
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%	50.000.000	APBD





			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100%	50.000.000	APBD
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terupdatenya sistem informasi kebutuhan barang/produk melalui sistem jaringan informasi perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100%	100.000.000	APBD
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	Kab. Kep. Selayar	100%	420.000.000	APBD
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku	Kab. Kep. Selayar	100%	420.000.000	APBD
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pengendalian Alat UTTP	Kab. Kep. Selayar	650 Alat	180.000.000	APBD
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	210.000.000	APBD
			Penyidikan Metrologi Legal	Alat standar yang tertelusur	Kab. Kep. Selayar	100%	30.000.000	APBD
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kab. Kep. Selayar	100%	890.000.000	APBD
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global	Kab. Kep. Selayar	100%	890.000.000	APBD





			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Monitoring dan Evaluasi Sentra IKM	Kab. Kep. Selayar	11 Sentra	550.000.000	APBD
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jeneponto	Kab. Kep. Selayar	100 persen	340.000.000	APBD
				pembangunan rumah kreatif Dekranasde di Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten		APBD
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah pelaku IKM yang evaluasi	Kab. Kep. Selayar	50%		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan perencanaan dan pembangunan industri	Kab. Kep. Selayar	100%	8.000.000.000	APBD
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global	Kab. Kep. Selayar	100%	8.000.000.000	APBD
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Kab. Kep. Selayar	12 Sentra	1.580.000.000	APBD
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pendampingan Sentra	Kab. Kep. Selayar	11 Sentra	550.000.000	APBD





		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Kab. Kep. Selayar	16 Kali	1.295.000.000	APBD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	2.650.000.000	APBD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone	Kab. Kep. Selayar	2 IKM	1.350.000.000	APBD
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	pameran Industri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri	Kab. Kep. Selayar	4 Kali	575.000.000	APBD
TOTAL PAGU						22.996.543.000	





D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya manusia yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.





Tabel 2.4.1
Pernjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	- Meningkatnya Nilai SAKIP	1. Nilai Perencanaan Kinerja 2. Nilai Pengukuran Kinerja 3. Nilai Pelaporan Kinerja 4. Nilai Evaluasi Internal	21,25 14,15 13,15 12,51
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	70
	- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan sesuai SAP	100
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	1. Persentase koperasi aktif 2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif 3. Persentase BPR/LKM aktif 4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil 5. Persentase Koperasi yang berkualitas 6. Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	88 100 100 100 4 31.058





3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB 2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 3. Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah 4. Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja 5. Persentase IKM yang terdaftar pada sistem informasi nasional 	<p style="text-align: right;">2,9</p> <p style="text-align: right;">7,88</p> <p style="text-align: right;">1300</p> <p style="text-align: right;">0,67</p> <p style="text-align: right;">60</p>
4.	Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan 2. Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan 3. Persentase alat UTTP bertanda terasah yang berlaku 4. Persentase produk lokal yang dipasarkan 5. Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal 6. Cakupan bina kelompok pengrajin 	<p style="text-align: right;">60</p> <p style="text-align: right;">60</p> <p style="text-align: right;">12,04</p> <p style="text-align: right;">60</p> <p style="text-align: right;">60</p> <p style="text-align: right;">100,9</p>





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menangani 2 urusan, 1 Urusan wajib yakni Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 2 urusan pilihan yakni urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian, Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan, Meningkatnya Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar, Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, dan Meningkatnya Kualitas UMKM . Untuk mencapai sasaran strategis



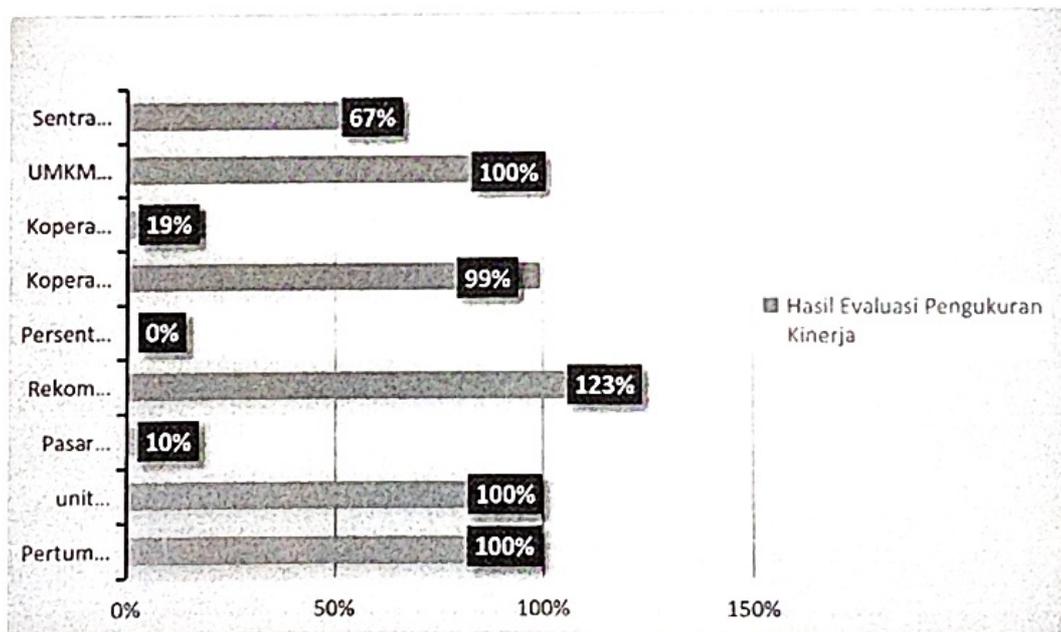


tersebut dibutuhkan 9 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 menunjukkan indikator telah dicapai dengan hasil yang "baik".

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Hasil terhadap pengukuran kinerja





B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

1. Target dan Realisasi Kinerja

Dari Indikator-Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan rata-rata capaian realisasi di rinci pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Target dan Realisasi Kinerja

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian			
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	25 IKM	25 IKM	100
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	51 IKM	51 IKM	100
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar			
	a. Pasar rakyat dalam kondisi baik	85	85	100
	b. Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	1000	1232	123,2
	c. Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH	600 UTTP	0 UTTP	0
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM			
	a. Persentase Koperasi Aktif	138	137	99,27





b.	Persentase Koperasi Sehat	150	28	18,66
c.	Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	350 UKM	350 UKM	100
d.	Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	45 UKM	30 UKM	66,66

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu, dapat dilihat berdasarkan IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		% Capaian Kinerja	Tahun 2022		% Capaian Kinerja
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian						
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	50 IKM	48 IKM	96	25 IKM	25 IKM	100
b.	Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	32 IKM	32 IKM	100	51 IKM	51 IKM	100
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrollogian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar						
a.	Pasar rakyat dalam kondisi baik	80%	60%	75	85%	85%	100
b.	Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	80	76	95	1000	1232	123,2
c.	Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH	600 UTTP	257 UTTP	43	600 UTTP	0	0
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM						

a.	Persentase Koperasi Aktif	138	136	98	138	137	99,27
b.	Persentase Koperasi Sehat	150	89	59	150	28	18,66
c.	Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	350 UKM	346 UKM	98	350 UKM	350 UKM	100
d.	Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	45 UKM	31 UKM	69	45 UKM	30 UKM	66,66

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian indikator tersebut melalui 9 indikator sampai tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

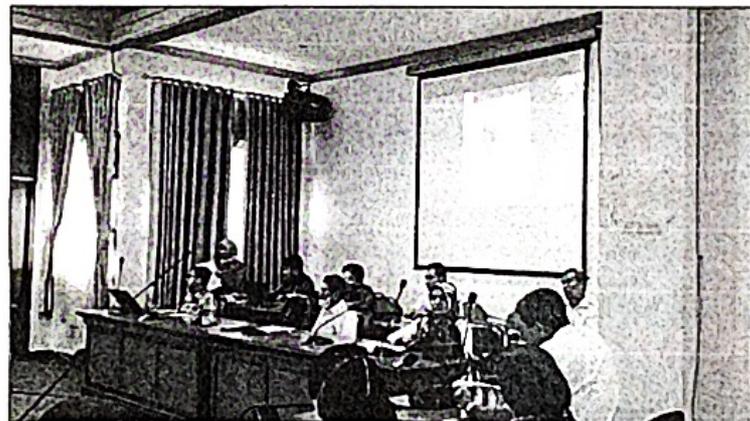
3.1. Pertumbuhan Sektor Industri

Pertumbuhan industri didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan output pelaksanaan Coaching dan Workshop IPRO (Investment Project Ready to Offer) kawasan distribusi logistik - KTI dan kawasan industri kerjasama Kementerian Investasi / BKPM.



2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan output pelaksanaan Penyusunan Master Plan (Rencana Induk) dan Fisibility Study (Study Kelayakan) pembangunan KIS (Kawasan Industri Selayar) serta KIPT (Kawasan Industri Perikanan Terpadu) kerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan LPPM Universitas Bosowa.



3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, pembentukan 3 sentra di 3 kecamatan. Yaitu Sentra Pengolahan Ikan di Pasilambena, Sentra Kapal Rakyat di Pasimarannu dan Sentra Olahan Ikan di Taka Bonerate.



4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, output study lokasi pembangunan KIS (Kawasan Industri Selayar) serta KIPT (Kawasan Industri Perikanan Terpadu).



5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, output pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan, pengolahan kelapa dan pengolahan jambu mente. Sebanyak 18 angkatan dengan jumlah peserta 1080 pelaku ukm dari 11 kecamatan kabupaten kepulauan selayar
6. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, output pelaksanaan pameran industri kreatif, dekranasda dan pekan raya sulsel.
7. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan KIS (Kawasan Industri Selayar) serta KIPT (Kawasan Industri Perikanan Terpadu), output pelaksanaan workshop penyusunan rencana pembangunan multi moda





transportation dan mekanisme pembebasan lahan untuk kawasan

3.2. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah

Peningkatan unit usaha industri unggulan daerah didukung oleh Program Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota, dengan kegiatan :

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota output pembangunan sentra pengolahan ikan di kecamatan bontoharu dengan anggaran sebesar Rp. 6.409.581.125 dan capaian sebesar 100 %.

3.3. Pasar Dalam Kondisi Baik

Pasar rakyat dalam kondisi baik didukung dengan Program Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan pihak buyer.

Penyerahan hibah Pasar Rakyat Pasimarannu dan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur sekaligus pemberian penghargaan atas partisipasi pembangunan pasar oleh pihak Kementerian Dalam Negeri

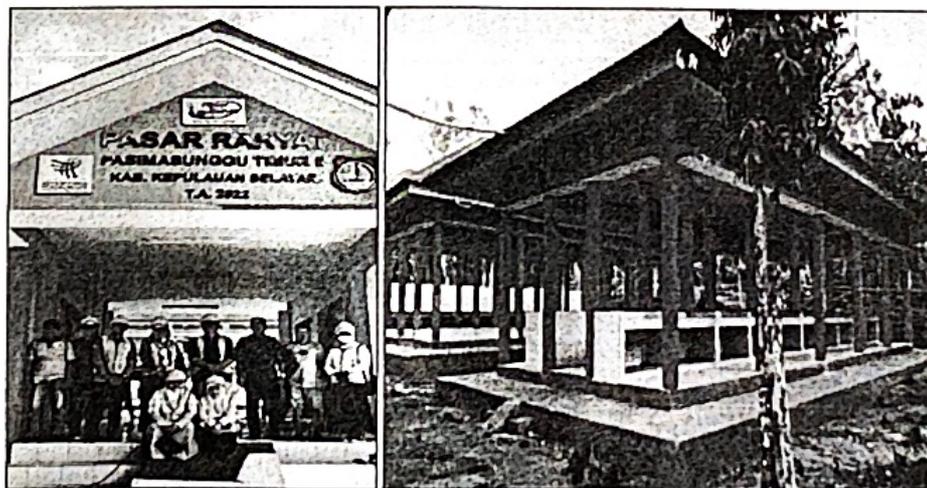


Dana APBN untuk tahun 2018-2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebanyak 10 (Sepuluh) pasar di 9 kecamatan yakni Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Benteng, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanain, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur, tahun 2022 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 2 (dua) kecamatan, yakni :

- ✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu dengan anggaran sebesar Rp. 2.801.100.000,-



- ✓ Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur di Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.910.000,-



2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kecamatan daratan dan kepulauan dengan output sosialisasi pada 70 orang pelaku usaha.

3.4. Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Yang Diterbitkan

Rekomendasi izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, output terbitnya 1232 Rekomendasi dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.



3.5. Persentase UTTP Bertanda Tera SAH

Persentase Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) yang bertanda tera sah didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, output Total jumlah alat yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak 379 alat UTTP. Sedangkan persentase alat UTTP yang bertanda tera





SAH tidak ada dikarenakan tidak adanya tenaga penera akibat kesalahan penyetaraan jabatan fungsional penera.

Tabel 3.2.3
Daftar Rincian Alat UTTP yang diawasi

No	Jenis UTTP	Tahun Anggaran			
		2018	2019	2020	2021
1	Takaran Kering	179	199	90	126
2	Timb. Pegas	135	179	98	162
3	Timb. Centicimal	21	14	12	13
4	Meter Kayu	3	6	2	1
5	Timb. Elektronik	7	9	8	13
6	Dacin Logam	15	17	9	17
7	Anak Timbangan	81	15	25	31
8	Neraca Emas	10	9	3	1
9	Timb. Bobot Insut		1	1	1
10	SPBU	17	8	15	10
11	Timb. Meja	1	3	1	-
12	Timb. Pegas Cepat	-	-	1	1
13	AMP	-	1	1	-
14	Timb. Digital	-	-	1	-
15	Timb. Elektronik Emas	-	-	1	3
Jumlah Alat		469	461	268	379
Jumlah Retribusi			Rp 10.404.000	Rp 7.747.000	Rp 3.941.000





3.6. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif didukung oleh Program :

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, output 50 Koperasi
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, output 137 koperasi aktif dari 168 jumlah koperasi dari 11 kecamatan di Kepulauan Selayar

Tabel 3.2.4

Persentase koperasi aktif tahun 2017-2022

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif	145	131	162	136	136	137
2	Jumlah koperasi	189	161	132	165	165	167
3	Persentase koperasi aktif	76,72	81,37	81,48	82,42	82,42	82,03

3.7. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat didukung oleh program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, output 2 koperasi sehat dari 138 koperasi aktif di 11 kecamatan di Kepulauan Selayar. Yang menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM





Tabel 3.2.5

Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2022 Sebanyak 500 Kelompok, dengan Jumlah Unit Sebanyak 2.813 Unit Bantuan Peralatan.

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Depot Air Minum	2	2
2	Pengadaan AMDK	1	1
3	Pengadaan Masak-memasak	11	55
4	Mesin Jahit	6	35
5	Parut Kelapan	7	36
6	Ada Pertukangan	10	70
7	Perbengkelam	8	73 Unit
	Jumlah	45 Kelompok	132 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2	2 unit
2	Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti	3	20 Unit
3	Pengadaan Mesin jahit	3	12 Unit
4	PengadaanMesin Obras	3	9 Unit
5	Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan	1	1 Unit
6	Pengadaan Pertukangan	14	92 unit
7	Pengadaan Mesin Sentri Fugar	4	4 Unit
8	Pengadaan Mesin penggiling Mie	9	27 Unit
9	Pengadaan Mesin Pemeras kelapa	9	9 Unit
10	Pengadaan mesin gula Merah	4	4Unit
	Jumlah	52	180 Unit



Republik Indonesia sejak tahun 2016-2021 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.

3.8. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif

Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif didukung oleh Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, output pelatihan dan sosialisasi kepada 275 peserta.



3.9. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang dikembangkan

Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang dikembangkan didukung oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) , dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, output dengan pemberian bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 132 unit dalam 45 kelompok.





Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2017 Sebesar Rp.

1.506.772.250,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Peralatan Masak Memasak	23 Kelompok	427 Unit
2	Pengadaan Mesin Spinner	22 Kelompok	73 Unit
3	Pengadaan Mesin Penggiling Daging	15 Kelompok	30 Unit
4	Pengadaan Mesin Pembuat Roti	22 Kelompok	20 Unit
5	Pengadaan Alat Kacip	21 Kelompok	96 Unit
Jumlah		103 Kelompok	217 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp.

1.997.459.250,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengering	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
Jumlah		209 Kelompok	614 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar

Rp.1.258.575.000,- terdiri dari ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	12 Kelompok	60 Unit





3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit
8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
Jumlah		91 Kelompok	901 Unit

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efisiensi dari masing-masing Urusan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tabel dibawah ini:

NO	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomi %	Capaian Kinerja %
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian				
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	776.331.000	744.002.200	95,83	96
b.	Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	776.331.000	744.002.200	95,83	96
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar				
a.	Pasar rakyat dalam kondisi baik	123.327.000	121.852.250	98,80	99
b.	Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	20.405.500	17.137.500	83,98	84
c.	Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH	123.581.500	113.565.400	91,89	92





III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM				
a.	Persentase Koperasi Aktif	163.640.000	163.640.000	100	100
b.	Persentase Koperasi Sehat	48.578.000	48.413.000	99,66	100
c.	Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	4.170.915.000	3.428.412.500	90,70	100
d.	Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	564.634,000	550.074.000	99,98	100

C. REALISASI KEUANGAN

Dana yang dianggarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD tahun 2022, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 20.048.534.875,- Terealisasi sebesar Rp. 18.631.135.620,- atau 92,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.416.399.255,-.

Tabel 3.3.1
Realisasi Keuangan Tahun 2022

No	Nama Program dan Kegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Rp.776.331.000,00	Rp.744.002.200,00	95,84
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Rp.229.131.000,00	Rp.223.231.000,00	97,43
	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan	Rp.165.000.000,00	Rp.150.552.600,00	91,24





Perwilayahan Industri		percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Rp. 5.400.000,00	Rp.5.220.000,00	96,67
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone	Rp.46.800.000,00	Rp.45.267.800,00	96,73
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	pameran Indsutri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri	Rp.330.000.000,00	Rp.319.730.800,00	96,89
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase izin usaha yang dikeluarkan	Rp.8.129.742.125,00	Rp.7.627.629.034,00	93,82
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sitem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri	Rp.1.720.161.000,00	Rp.1.637.858.200,00	95,22





	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/ Jenepono	Rp.6.409.581.125,00	Rp.5.989.770.834,00	93,45
3	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Surat Rekomendasi Perizinan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
4	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaannya	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
5	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar rakyat yang dibina dan dikendalikan	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
6	Menjamin Ketersediaan Barang	Persentase peningkatan	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100



	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar			
	Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100
7	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	Rp.272.070.000,00	Rp.271.422.200,00	99,76
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga barang dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.102.000.000,00	Rp.101.534.000,00	99,54
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp.50.200.000,00	Rp.50.018.200,00	99,64
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Rp.119.870.000,00	Rp.119.870.000,00	100





8	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan transaksi	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
9	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat UTTP dengan tanda tera sah yang berlaku	Rp.123.581.500,00	Rp.113.565.400,00	91,90
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Rp.25.968.500,00	Rp.24.620.400,00	94,81
	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik	Rp.97.613.000,00	Rp.88.945.000,00	91,12
10	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terupdatenya sistem informasi kebutuhan barang/produk melalui sistem jaringan informasi perdagangan	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat Organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang ber-RAT	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66





12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Data Base yang Tersusun	Rp.553.147.000,00	Rp.550.074.000,00	99,44
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan yang terverifikasi sebagai pelaku usaha	Rp.79.400.000,00	Rp.79.344.000,00	99,93
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Rp.203.074.000,00	Rp.202.677.200,00	99,80
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Jumlah Sentra yang dikembangkan	Rp.237.160.000,00	Rp.234.560.000,00	98,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pada pelatihan	Rp.33.513.000,00	Rp.33.492.800,00	99,94
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha yang berkembang usahanya	Rp.4.170.915.000	3.428.412.500	82,20



	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok UMKM Penerima Bantuan	Rp.4.170.915.000	3.428.412.500	82,20
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (%)	Rp.48.762.000,00	Rp.48.202.000,00	98,85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Rp.12.020.000,00	Rp.11.710.000,00	97,42
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rp.3.942.000,00	Rp.3.942.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Rp.7.460.000,00	Rp.7.460.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Rp.1.704.000,00	Rp.1.704.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Rp.7.382.000,00	Rp.7.282.000,00	98,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ)/LPPD, Buku Profil)	Rp.8.443.000,00	Rp.8.393.000,00	99,41
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Rp.7.811.000,00	Rp.7.711.000,00	98,72
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	Rp.2.880.932.658	Rp.2.822.333.888	97,97



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Rp.2.865.932.658,00	Rp.2.807.333.888,00	97,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun (%)	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	Rp.867.288.600,00	Rp.866.799.200,00	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.266.960.600,00	Rp.266.960.000,00	100



	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.133.431.000,00	Rp.133.372.200,00	99,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.10.000.000,00	Rp.9.570.000,00	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase peningkatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.36.120.000,00	Rp.36.120.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.420.777.000,00	Rp.420.777.000,00	100
20.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran (%)	Rp.734.372.150,00	Rp.682.262.900,00	92,90
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.26.664.400,00	Rp.26.664.400,00	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Rp.25.530.000,00	Rp.25.530.000,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Rp.266.328.500,00	Rp.266.328.500,00	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Rp.166.789.250,00	Rp.148.766.000,00	89,19
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.249.060.000,00	Rp.214.974.000,00	86,31



21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi dan operasional perkantoran	Rp.646.575.342,00	Rp.638.552.946,00	98,76
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.5.330.000,00	Rp.5.330.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.163.830.542,00	Rp.161.502.546,00	98,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan pelayanan umum kantor	Rp.477.414.800,00	Rp.471.720.400,00	98,81
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Rp.309.877.000,00	Rp.309.274.500,00	99,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.97.560.000,00	Rp.97.086.000,00	99,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.24.010.000,00	Rp.24.010.000,00	100
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.25.762.000,00	Rp.25.633.500,00	99,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp.81.700.000,00	Rp.81.700.000,00	100



	Lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.80.845.000,00	Rp.80.845.000,00	100

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.

1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.3.2

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Sumber	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Reribusi Pelayanan Pasar	500.000.000	174.392.450	34,87
2.	Layanan Tera/Tera Ulang	25.968.500	24.620.400	94,80
	Jumlah	525.968.500	199.012.850	37,83



2. Belanja

Tabel 3.3.3

Rekapitulasi Belanja Tahun 2022

Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
- Belanja Operasi	12.996.781.600	12.696.048.570	300.733.030	97,69
- Belanja Modal	7.051.753.275	6.984.025.700	67.727.575	99,04
Surplus/(defisit)	20.048.534.875	19.680.074.270	368.460.605	98,16



BAB IV PENUTUP

Dari hal-hal yang telah terurai melalui bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dapat dicapai dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi.

permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya dengan keterbatasan waktu, keterlambatan dalam pencairan keuangan serta untuk pembinaan diwilayah kepulauan terhambat masalah cuaca yang kurang mendukung. Pemecahan dari permasalahan dan kendala perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang agar pelaksanaan dapat lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel.

Selanjutnya masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan laporan ini dapat tercapai dengan lebih baik dan untuk menjadi perbaikan dimasa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.

